



KOTA PONTIANAK

2023

# LAPORAN KINERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



 [dp2kbp3a@pontianak.go.id](mailto:dp2kbp3a@pontianak.go.id)

 <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/>



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban yang memuat informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pontianak,                      Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PONTIANAK**

**SINTYA AUGUSTIANTI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19710817 199903 2 004



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	28
BAB IV : PENUTUP .....	77
LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Rencana Aksi 2023	
3. Renstra 2020 - 2024	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), memiliki nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (BP2KB), munculnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak menyebabkan perubahan nomenklatur nama BP2KB menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB), dengan masuknya Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada waktu itu BPMPAKB memiliki tiga urusan wajib yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Keluarga Berencana.

Pada tahun 2017, sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah nomenklatur BPMPAKB berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dengan kriteria tipologi A dan menjalankan urusan wajib bukan pelayanan dasar pemerintah yaitu bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## 1. Tupoksi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sesuai Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
  1. Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur; Dan
  2. Kepala Subbagian Perencanaan;
- c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat;

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Berikut tugas pokok dari masing-masing jabatan yang ada di DP2KBP3A Kota Pontianak :

### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

### b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

### c. Kasubbag Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

**d. Kasubbag Perencanaan**

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan.

**e. Kasubbag Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Keuangan.

**f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk.

**g. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

**h. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

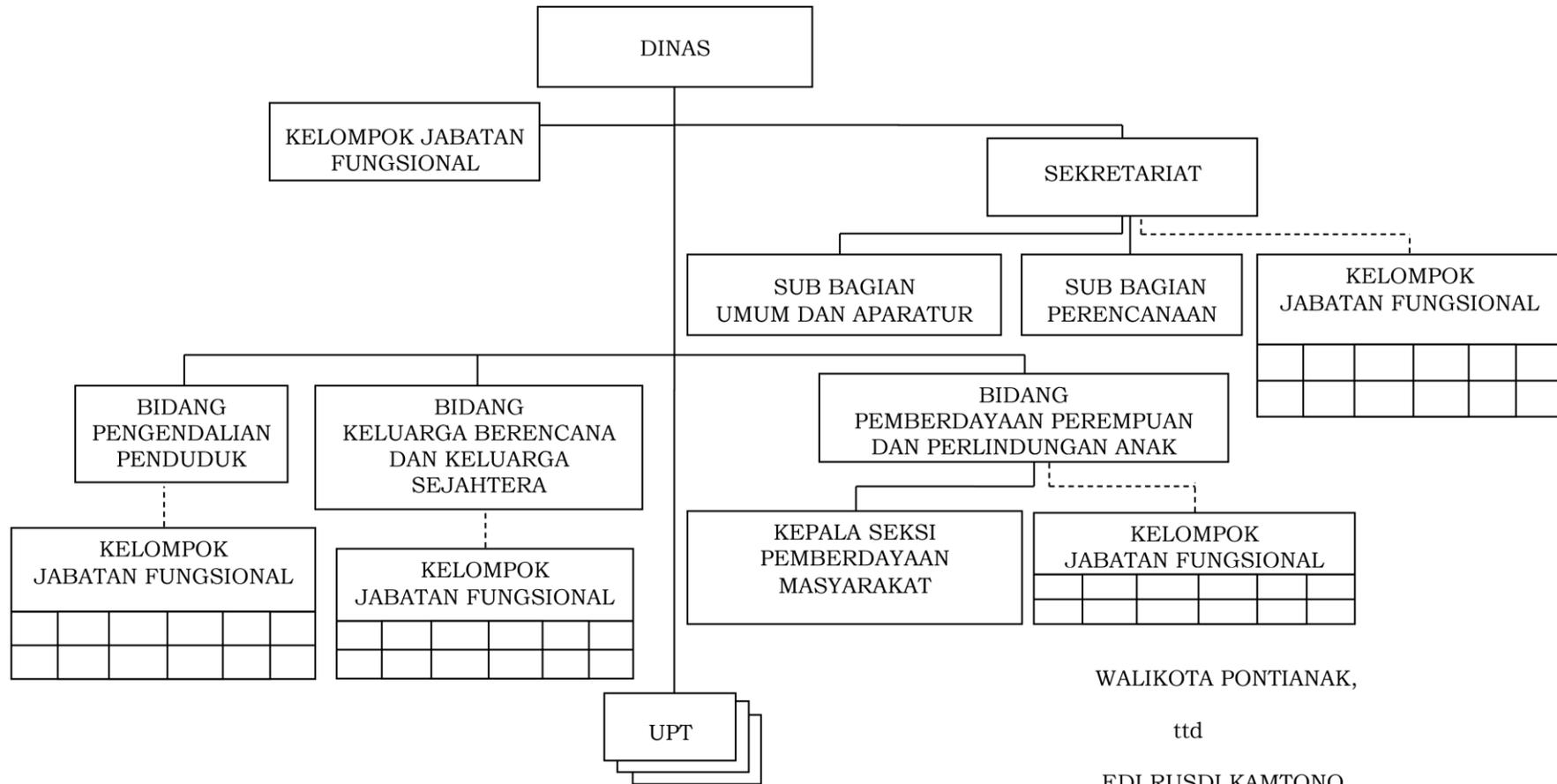
**i. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas pokok mengolah dan

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak**



### **3. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak memerlukan berbagai sumber daya sebagai berikut; Sampai dengan tahun 2023 jumlah pegawai DP2KBP3A Kota Pontianak berjumlah 43 orang yang terdiri dari 32 orang pegawai berstatus ASN dan 11 orang pegawai berstatus non ASN.

Pegawai berpendidikan Strata 1 memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding Pegawai dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebanyak 23 Pegawai yang terdiri dari 21 orang ASN dan 1 orang pegawai non ASN, sedangkan Pegawai dengan tingkat Pendidikan D3 berjumlah 6 orang, semuanya berstatus ASN, Pegawai dengan tingkat Pendidikan Strata 2 berjumlah 4 orang, semuanya berstatus ASN dan pegawai dengan tingkat Pendidikan SMA berjumlah 12 orang, dengan rincian 1 orang berstatus ASN sedangkan 10 orang berstatus non ASN

### **4. Sarana dan Prasarana**

Sarana Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak terdiri dari: Gedung kantor, rumah shelter, kendaraan roda empat sebanyak 4 unit, kendaraan roda dua sebanyak 54 unit dan sarana pendukung lainnya seperti yang terdapat dalam kartu inventaris barang.

### **5. Sumber Daya Keuangan**

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak telah mengacu kepada Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu melalui Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Rencana Strategis dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi tahun 2023 bersumber dari APBD Kota Pontianak berupa Dokumen Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 14.250.924.802,00 dengan perincian sebagai berikut :

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
5	BELANJA DAERAH	14.001.552.712	14.250.924.802	249.372.090,00	1,78
5.1	BELANJA OPERASI	11.540.929.112	11.772.032.402	231.103.290,00	2,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.217.328.112	5.129.246.291	(88.081.821,00)	(1,69)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.623.601.000	4.942.786.111	319.185.111,00	6,90
5.1.05	Belanja Hibah	1.700.000.000	1.700.000.000	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	2.460.623.600	2.478.892.400	18.268.800,00	0,74
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.850.332.600	1.868.601.400	18.268.800,00	0,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	610.291.000	610.291.000	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	14.001.552.712	14.250.924.802	249.372.090,00	1,78
	Surplus/Defisit	-	-	249.372.090,00	-1,75
		14.001.552.712,00	14.250.924.802,00		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Pontianak tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, total belanja OPD sebelum perubahan adalah Rp 14.001.552.712, dan setelah perubahan menjadi Rp 14.250.924.802. Terjadi penambahan belanja sebesar Rp 249.372.090 atau sekitar 1,78%.

Penambahan APBD berasal dari dana Insentif Fiskal Penurunan Stunting. Belanja OPD terbagi menjadi dua kategori utama:

a. Belanja Operasi:

Sebelum perubahan: Rp 11.540.929.112 Sesudah perubahan: Rp 11.772.032.402. Terjadi peningkatan sebesar Rp 231.103.290 atau sekitar 2,00%. Rincian belanja operasi meliputi: Belanja Pegawai: Sebelum perubahan: Rp 5.217.328.112, sesudah perubahan: Rp 5.129.246.291 (penurunan sebesar Rp 88.081.821 atau 1,69%). Belanja Barang dan Jasa: Sebelum perubahan: Rp 4.623.601.000, sesudah perubahan: Rp 4.942.786.111 (peningkatan sebesar Rp 319.185.111 atau 6,90%). Belanja Hibah: Tidak mengalami perubahan (tetap Rp 1.700.000.000).

b. Belanja Modal:

Sebelum perubahan: Rp 2.460.623.600 Sesudah perubahan: Rp 2.478.892.400. Terjadi peningkatan sebesar Rp 18.268.800 atau sekitar 0,74%. Rincian belanja modal meliputi: Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Sebelum perubahan: Rp 1.850.332.600, sesudah perubahan: Rp 1.868.601.400 (peningkatan sebesar Rp 18.268.800 atau 0,99%). Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Tidak mengalami perubahan (tetap Rp 610.291.000).

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhadapan dengan permasalahan utama yang berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

**a. Lingkungan Internal**

- a) Sarana dan prasarana belum memadai.
- b) Pengelolaan dan pengembangan data belum optimal.
- c) Masih kurangnya tenaga teknis yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing - masing.

- d) Jumlah personel yang belum memadai di bidang Pengendalian Penduduk dimana hanya tersedia 2 orang staf untuk membantu 2 kepala seksi.

**b. Lingkungan Eksternal**

- a) Masih adanya kematian Ibu Hamil muda.
- b) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c) Penjualan Anak (Trafficking)
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat Kurang Mampu dalam melakukan Program KB.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan di daerah disertai dengan penyerahan keuangan untuk dapat melaksanakan kewenangannya. Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu disusun Laporan Kinerja seperti diatur dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder*, sekaligus sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja agar terdapat upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

2. RENCANA AKSI

3. RENSTRA PERUBAHAN KE-2 2020 - 2024

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020 berkaitan erat dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak yang tertuang dalam Rencana Strategis DP2KBP3A Kota Pontianak tahun 2020-2024 sebagai berikut:

##### 1. Visi dan Misi Walikota Pontianak

**PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT**

Untuk mewujudkan Visi Walikota tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 1 yaitu **“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya”** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah **“Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”**.

##### 2. Tujuan dan Sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah sejalan dengan tujuan yang

hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun focus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS : “ Meningkatkan Pengendalian  
Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran  
Perempuan dan Perlindungan Anak”**

**OPD PENGAMPU : Dinas Pengendalian Penduduk, KB,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak**

<b>NO (1)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (2)</b>	<b>TARGET 2023 (3)</b>
<b>1</b>	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,23%
<b>2</b>	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%
<b>3</b>	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya

### 3. Perjanjian Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2022 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Walikota Pontianak. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada bulan Oktober 2022 sebagaimana terlampir pada laporan ini.

Penetapan Kinerja, yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut PermenPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini, terwujudlah komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

#### **Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,23%
2	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam IKU dan Perjanjian Kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

### 1. SASARAN 1 : “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,23%

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **1** Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Kinerja **Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak** pada tahun 2023 menargetkan 1,23% pertumbuhan penduduk Kota Pontianak, hal ini sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023 antara Kepala Dinas DP2KBP3A dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 3 (tiga) Program, 5 (lima) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan

#### a. Indikator “Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak”.

Strategi pencapaian Indikator ini melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan sebagai berikut :

##### 1) Program Pengendalian Penduduk;

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	a) TFR (Angka Kelahiran Total)	2,21%
			b) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	400

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka

Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan target output kegiatan yaitu : Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk sebesar 90 persen.

i. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen

b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : persentase stakeholder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 80%

i. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 1 dokumen

## 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	a) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,52 %
			b) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8 %

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan yaitu: Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) sebesar 100%
- i. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal sebanyak 1 dokumen
  - ii. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang sebanyak 1 dokumen
  - iii. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) sebanyak 2 laporan
  - iv. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sebanyak 4 laporan
- v. Pengendalian Program KKBPK dengan target output sub kegiatan yaitu :
  - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK sebanyak 4 laporan
- b) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : Persentase klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB sebesar 100%.
  - i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebanyak 4 laporan
  - ii. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 706 orang
  - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB sebanyak 9 paket

- iv. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan target output sub kegiatan yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebanyak 1 laporan
- c) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan target output kegiatan yaitu : Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 15 ormas
- i. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan target output sub kegiatan yaitu :
- Jumlah Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB sebanyak 7 kampung KB

### 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,9%

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan output kegiatan yaitu: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 62,44 %

- i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu :
  - Jumlah Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 20 unit
- ii. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu :
  - Tersedianya Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 270 kader
- iii. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan target output sub kegiatan yaitu :
  - Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 1 laporan.

## 2. SASARAN 2 : “Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
2	Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **2** Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak** pada tahun 2023 menargetkan 94,05%, target tersebut sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023 antara Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 3 (tiga) Program 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

### Indikator “Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak”.

Strategi pencapaian Indikator ini melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

#### 1) Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pengarus Utamaan Gender serta Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	a) Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Madya

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : Persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 12,17%
  - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG dengan target output yaitu :

- Jumlah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen
- ii. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
  - Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 30 OPD

## 2) Program Perlindungan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Target
1.	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,0036

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sebesar 100%
  - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
    - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen

- b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan sebesar 35%
- i. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen

### 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	60%

- a) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan 75%
- i. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Jumlah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 36 lembaga
- ii. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
  - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 1 dokumen

### 3. SASARAN 3 : “Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
3	<b>Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak</b>	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **3** Meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan 1 Indikator Kinerja. Hal ini sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023 antara Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 2 (dua) Program 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan

#### 1) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a) Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha sebesar 50%
- i. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
- Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha sebanyak 40 organisasi

## 2) Program Perlindungan Khusus Anak

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	a) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan target output kegiatan yaitu : Persentase korban kekerasan anak yang terlayani sebesar 100%
- i. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :

- Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 80 orang
- ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
  - Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 80 layanan
- b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu : Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan 30%
- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan / kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan Dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

1. Dokumen Rencana Strategis Perubahan Ke- 2 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (**Lampiran** );
2. Dokumen rencana kegiatan atau Rencana Aksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 (**Lampiran** );
3. Dokumen penetapan kinerja (TAPKIN), sebagaimana termuat pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 (**Lampiran** );
4. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran Tahun 2023.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mencakup 7(tujuh) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Restra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2023 dengan Standar Nasional

5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan dan sub kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

#### **1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	= Berhasil
55 < X ≤ 70	= Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing - masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata - Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran dengan "**Metode Rata- Rata Data Kelompok**" adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai maen (rata - rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil** dan **tidak berhasil**.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, tingkat Pencapaian indikator sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

**Tabel. III.1**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis DP2KBP3A Kota Pontianak**  
**Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Skala Pengukuran Ordinal			
			X > 85	70 < X ≤ 85	55 < X ≤ 70	X ≤ 55
<b>1.</b>	<b>Sasaran Strategis :</b>	<b>Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak</b>				
1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	121,95%				
<b>2.</b>	<b>Sasaran Strategis :</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>				
2.1	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	101,00%				
<b>3.</b>	<b>Sasaran Strategis :</b>	<b>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak</b>				
3.1	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (100%)				
<b>Jumlah Keseluruhan Capaian</b>		<b>107,65%</b>				

Dari tabel diatas dapat terlihat dari 3 indikator sasaran, 3 indikator sasaran dikategorikan sangat baik.

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS : “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak”

OPD PENGAMPU : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,23%	0,96%

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

**Tabel. III.2**

#### **Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,23%	0,96%	121,95%

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2022/2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 3 indikator kinerja utama yaitu :

1) **“Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak”** dengan target 1,23% **“sangat berhasil”** dicapai dengan realisasi jauh diatas yang telah ditargetkan yaitu 0,96% laju pertumbuhan kota Pontianak. Data merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pontianak dalam buku Kota Pontianak Dalam Angka 2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Berhasil”** jika Realisasi lebih kecil atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Tidak Berhasil”** jika Realisasi lebih besar dari Target.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak yaitu :

- Program Pengendalian Penduduk;  
Pencapaian Program didukung dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaiannya dibawah 90% karena ada efisiensi dalam realisasi makan minum kegiatan dan pembayaran biaya langganan internet.
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);  
Ada 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 sub kegiatan yang capaian realisasi dibawah 80% dikarenakan sumber dana DAK Non Fisik BOKB. karena ada beberapa belanja yang tidak dapat diserap antara lain; Audit Kasus Stunting (AKS), terdapat efisiensi dalam belanja makan minum kegiatan, belanja bahan habis pakai (obat penunjang) pelayanan KB MKJP tidak dapat diserap dikarenakan stok BHP obat penunjang pelayanan KB masih tersedia di Gudang Alkon.
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);  
Ada 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, seluruh sub kegiatan pencapaian target diatas 90%.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Terkendalin ya Laju Pertumbuh an Penduduk Kota Pontianak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	143.145.000	121.808.721	85,09	93,21	21.336.279
2.		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.508.061.600	4.203.260.978,57	93,23	98,80	304.800.621,43
3.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.053.028.700	1.041.705.700	98,92	100	11.323.000

**Sasaran strategis pertama adalah terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak.** Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah program pengendalian penduduk. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah **Rp 143.145.000**. Realisasi anggaran yang digunakan adalah **Rp 121.808.721**, atau **85,09%** dari anggaran. Capaian kinerja program ini adalah **93,21%**, yang berarti sesuai dengan realisasi anggaran. Program ini berhasil menghemat anggaran sebesar **Rp 21.336.279**.

Program kedua yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah program pembinaan KB. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah **Rp 4.508.061.600**. Realisasi anggaran yang digunakan adalah **Rp 4.203.260.978,57**, atau **93,23%** dari anggaran. Capaian kinerja program ini adalah **98,80%**, yang berarti sesuai dengan realisasi anggaran. Program ini berhasil menghemat anggaran sebesar **Rp 304.800.621,43**.

Program ketiga yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah program pemberdayaan dan peningkatan KS. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah **Rp 1.053.028.700**. Realisasi anggaran yang digunakan adalah **Rp 1.041.705.700**, atau **98,92%** dari anggaran. Capaian kinerja program ini adalah **100%**, yang berarti hampir mencapai target. Program ini berhasil menghemat anggaran sebesar **Rp 11.323.000**.

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Laju pertumbuhan Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	persen	2,2	2,06	106,79	Realisasi Indikator Program 2,06%, lebih rendah dari target 2,39% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 106,79%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
				Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran	400	550	62,50	Realisasi Indikator Program 550, lebih tinggi dari target 400 . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 62,50%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Rendah”
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	persen	90	75	83,33	Realisasi Indikator Kegiatan 75%, lebih tinggi rendah dari target 90% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 83,33%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tinggi”

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1dokumen, sama dengan target 1dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase stakeholder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100,00	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dari target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	1	1	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1dokumen, sama dengan target 1dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	70,52	69,68	98,81	Realisasi Indikator Program 69,68%, lebih rendah dari target 70,52%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 98,81%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”

No .	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	8	12,7	41,25	Realisasi Indikator Program 12,7%, lebih tinggi dari target 8% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 41,25%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Rendah”
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	persen	100	100	100,00	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dari target 100% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dokumen	1	1	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1dokumen, sama dengan target 1dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”

No.	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	1	1	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	2	2	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 laporan, sama dengan target 2 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	4	4	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 laporan, sama dengan target 4 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	laporan	4	4	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 laporan, sama dengan target 4 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	persen	100	100	100,00	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dari target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	4	4	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 laporan, sama dengan target 4 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	706	706	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 706 orang, sama dengan target 706 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"

No.	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	paket	9	9	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 9 paket, sama dengan target 9 paket. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	1	1	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 laporan, sama dengan target 1 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	ormas	15	15	100,00	Realisasi Indikator Kegiatan 15 ormas, sama dengan target 15 ormas. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Kampung KB	7	7	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 7 kampung kb, sama dengan target 7 kampung kb. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
				Keluarga Berencana) di Kampung KB					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	persen	20,9	23,25	111,24	Realisasi Indikator Program 23,25%, lebih tinggi dari target 20,9% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 111,24%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	persen	62,44	62,66	100,35	Realisasi Indikator Kegiatan 62,66%, lebih tinggi dari target 62,44% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100,35%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	unit	20	20	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 20 unit, sama dengan target 20 unit. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	orang	270	270	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 270 orang, sama dengan target 270 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator

No.	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	1	1	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 laporan, sama dengan target 1 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2023, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan di Tahun 2021. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut :

**Tabel III.3**  
**Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,23%	1,02%	0,96%	0,96%	121,95%

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2022/2023

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut :

- 1) Dari tabel diatas terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak: Realisasi tahun 2021 adalah 1,02%, lebih rendah dari target sebesar 1,23% yang artinya capaian lebih baik. Realisasi tahun 2022 adalah 0,96%, lebih rendah dari capaian tahun 2021. Realisasi tahun 2023 adalah 0,96%, sama dengan tahun 2022, karena data yang digunakan masih data capaian tahun 2023 (data 2023 belum rilis dari BPS). Ini berarti laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak cenderung stabil dan baik di bawah target. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak: Capaian kinerja tahun 2023 adalah 121,95%, yang berarti melebihi target sebesar 1,23%. Menurut data BPS Kota Pontianak, laju pertumbuhan penduduk per tahun pada

2020-2021 adalah 1,81%, sedikit menurun dari 1,96% pada 2019-2020. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Pontianak Timur (3,11%), sedangkan yang terendah adalah Pontianak Selatan (1,05%).

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

**Tabel. III.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Renstra**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,23%	0,96%	1,11%

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2022/2023

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator, Persentase laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak, indikator tersebut digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis DP2KBP3A Kota Pontianak, yaitu: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak, Data tersebut juga menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja utama pada tahun 2023, serta target akhir renstra pada tahun 2024. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa: Persentase laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak pada tahun 2023 adalah 0,96%, lebih rendah dari target 1,23%. Hal ini menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kota Pontianak berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran strategisnya. Bahkan, realisasi ini masih lebih tinggi dari target akhir renstra 1,11%, yang berarti capaian ini sudah sangat baik.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

**Tabel. III.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Standar Nasional
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,23%	0,96%	1,11

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2022/2023

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut : Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1,23% dan terealisasi sebesar 0,96% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN Pusat sebesar 1,11% sudah diatas target Nasional.

#### 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja Utama **Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak** pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1,23% dan terealisasi sebesar 0,96% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN sebesar 1,11% memang masih sedikit tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:
  - a) Belum terperdakannya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan

- b) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak sampai dengan tahun 2023 12,70%, jauh dibawah target nasional sebesar 8,60%.
- c) kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB
- d) Belum terbentuknya Pokja KKBPK dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, stakeholder dan forum masyarakat kampung KB dalam memberikan penyuluhan dan informasi tentang program-program KB serta mensukseskan program-program KB.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas yaitu :

- a) Membuat perda GDPK yang bermanfaat untuk menyediakan kerangka pikir dan panduan (road map) untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan
- b) Menyediakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara gratis, khusus untuk MKJP Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP) akan digratiskan pelayanannya khusus untuk masyarakat miskin yang tidak dicover oleh BPJS Kesehatan dan selain akan digratiskan, akseptor tersebut juga diberikan barang kebutuhan pokok untuk pengganti biaya hidup semasa mereka mendapatkan pelayanan pemasangan MOP dan MOW, hal ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan MKJP.
- c) Memaksimalkan peran Kampung KB dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

- d) Kolaborasi antara berbagai instansi terkait untuk mengoptimalkan program dan kebijakan terkait pertumbuhan penduduk.
- e) Meningkatkan Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Kampanye edukasi tentang perencanaan keluarga dan dampak pertumbuhan penduduk dapat membantu mengelola laju pertumbuhan.

SASARAN STRATEGIS : “Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan”

OPD PENGAMPU : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%	94,10%

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

**Tabel. III.2**

#### **Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%	94,10%	101,00%

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2022/2023

1) Indikator kinerja utama “**Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak**” dengan target 94,05% “**sangat berhasil**” dicapai dengan realisasi yaitu 94,10%, melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan “**Berhasil**” jika Realisasi lebih tinggi atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan “**Tidak Berhasil**” jika Realisasi lebih kecil dari Target.

Adapun Program yang mendukung Capaian “**Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak**” yaitu :

- Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan; Terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan, seluruh sub kegiatan pencapaian target diatas 90%.
- Program Perlindungan Perempuan;  
Ada 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan, seluruh sub kegiatan pencapaian target diatas 90%.
- Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;  
Ada 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi diatas 90%.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	29.362.800	29.362.800	100	100	0
2.		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	245.801.325	242.895.542	98,82	170,61	2.905.783
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.455.210.800	1.448.356.367	99,53	88,89	11.323.000

**sasaran strategis kedua yang ingin dicapai adalah meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.** Untuk mencapai sasaran ini, ada tiga program yang dilaksanakan, yaitu program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, dan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki realisasi anggaran 100%, dan capaian kinerja 100%. Program ini berhasil menghemat anggaran sebesar.

Program perlindungan perempuan memiliki realisasi anggaran 98,82%, tetapi capaian kinerja yang lebih tinggi dari target yaitu 170,61%, sehingga memiliki tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Program ini berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 2.905.783.

Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat memiliki realisasi anggaran 99,53%, tetapi capaian kinerja yang lebih rendah dari target, sehingga memiliki tingkat efisiensi yang rendah (88,89%). Program ini berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 11.323.000.

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya	Madya	100	Realisasi Indikator Program Kategori Madya, sama dengan target Kategori Madya . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	12,17	27,58	226,623	Realisasi Indikator Kegiatan 27,58%, lebih tinggi dari target 12,17% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 226,62%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1dokumen, sama dengan target 1dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi”
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan	persen	35	35	100	Realisasi Indikator Kegiatan 35%, sama dengan target 35%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator

No.	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan					Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	0,0036	0,0011	170,61	Realisasi Indikator Program 0,0036%, lebih tinggi dari target 0,0011%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 170,61%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	persen	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dari target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	persentase	35	35	100,00	Realisasi Indikator Kegiatan 35%, sama dari target 35%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	persen	90	80	88,89	Realisasi Indikator Program 80%, lebih tinggi dari target 90%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 88,89%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tinggi"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	75	85	113,33	Realisasi Indikator Kegiatan 85%, lebih tinggi dari target 75%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 113,33%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	36	36	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 36 lembaga, sama dengan target 36 lembaga. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	1	1	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 dokumen, sama dengan target 1 dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2023, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan di Tahun 2021. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut :

**Tabel III.3**  
**Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%	94,01%	94,10%	94,10%	101,00%

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2022/2023

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada Indikator sebagai berikut : Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak: Realisasi tahun 2021 adalah 94,01%, hampir sama dengan target sebesar 94,05%. Realisasi tahun 2022 adalah 94,10%, sedikit meningkat dari tahun 2021. Realisasi tahun 2023 adalah 94,10%, sama dengan tahun 2022, karena data yang digunakan masih data capaian tahun 2023 (data 2023 belum rilis dari BPS). Ini berarti Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak setiap tahunnya terjadi peningkatan. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak: Capaian kinerja tahun 2023 adalah 101,00%, Ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak telah mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan penghidupan. Menurut data BPS Provinsi

Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak pada 2022 adalah 94,10%, meningkat dari 94,01% pada 2021. Kota Pontianak memiliki IPG tertinggi di provinsi tersebut, diikuti oleh Kota Singkawang (92,83%) dan Kabupaten Ketapang (89,12%).

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

**Tabel. III.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Renstra**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Pontianak	Laju Persentase Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Laju 1,23%	0,96%	1,11%
2	Meningkatnya Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peran Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%	94,10%	94,17%
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2022/2023

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator : Data tersebut menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kota Pontianak memiliki tiga indikator kinerja utama, yaitu: Indeks pembangunan gender Kota Pontianak, indikator tersebut digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis DP2KBP3A Kota Pontianak, yaitu: Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Data tersebut juga menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja utama pada tahun 2023, serta target akhir renstra pada tahun 2024. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa: Indeks pembangunan gender Kota Pontianak pada tahun 2023 adalah 94,10%, sedikit lebih tinggi dari target 94,05%. Hal ini menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kota Pontianak berhasil

meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan sesuai dengan sasaran strategisnya. Realisasi ini juga hampir mencapai target akhir renstra 94,17%, yang berarti sudah cukup baik dalam mengurangi ketimpangan gender.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

**Tabel. III.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Standar Nasional
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%	94,10%	91,28%

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2022/2023

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut : Persentase capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 94,10%. indikator indeks pembangunan gender Kota Pontianak, Anda dapat merujuk pada Laporan Kinerja 2020 - Badan Standardisasi Nasional, yang menyajikan laporan kinerja BSN pada tahun 2020, termasuk kontribusinya pada prioritas nasional dan program prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Menurut laporan ini, salah satu indikator prioritas nasional adalah indeks pembangunan gender, yang memiliki target 91,28% pada tahun 2024. Realisasi DP2KBP3A Kota Pontianak pada tahun 2023 adalah 94,10%, yang lebih tinggi dari target nasional.

## 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

### 1) Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak

Faktor penghambat pencapaian IKU

- a) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
- b) **Harapan Hidup**: Faktor ini mencakup **angka harapan hidup** pada saat lahir. Jika perbedaan harapan hidup antara laki-laki dan perempuan signifikan, ini dapat memengaruhi IPG.
- c) **Pendidikan: Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah** juga mempengaruhi IPG. Jika perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih rendah, ini dapat memperburuk ketidaksetaraan.
- d) **Kehidupan yang Layak: Perkiraan pendapatan** adalah indikator penting. Jika perempuan memiliki pendapatan yang lebih rendah, ini memengaruhi IPG.
- e) **Keterwakilan di Parlemen**: Proporsi **keterwakilan perempuan di parlemen** juga relevan. Jika partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik rendah, ini mempengaruhi IPG.
- f) **Distribusi Pendapatan: Upah buruh non-pertanian** juga memainkan peran. Jika perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah, ini memperburuk ketidaksetaraan.
- g) Belum terbentuknya UPTD PPA (**Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**)

Solusi yang dilakukan:

- a) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak.
- b) Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi semakin tinggi di Kota Pontianak, sehingga kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki semakin mengecil.
- c) meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan kesadaran tentang kesehatan.
- d) melibatkan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan.
- e) pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan kesempatan kerja.
- f) Melakukan Kampanye edukasi tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.
- g) Meningkatkan akses perempuan ke peluang kerja dan pelatihan.
- h) Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan.
- i) Membentuk UPTD PPA untuk menyediakan layanan terhadap kasus-kasus kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. Melibatkan perempuan dan anak-anak dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang berbasis hak asasi.

- SASARAN STRATEGIS : “Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.”
- OPD PENGAMPU : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Tabel. III.2

#### Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2022/2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 3 indikator kinerja utama yaitu :

- 1) Indikator kinerja utama **“Tingkat Capaian Kota Layak Anak”** dengan target kategori Nindya (100%) **“sangat berhasil”** dicapai, berdasarkan penilaian dari kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 Kota Pontianak dianugerahkan kategori Nindya untuk capaian Kota Layak Anak.

Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Berhasil”** jika Realisasi lebih tinggi atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Tidak Berhasil”** jika Realisasi lebih kecil dari Target.

Adapun Program yang mendukung capaian IKU diatas yaitu :

- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);  
Ada 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan, trealisasi di atas sebesar 90%
- Program Perlindungan Khusus Anak;  
Terdapat 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, 1 sub kegiatan realisasi dibawah 80%, dikarenakan sumber pendanaan dari DAK Non Fisik, peruntukan belanja sudah ditetapkan oleh kementerian, sehingga daerah tidak bisa melakukan pergeseran anggaran yang tidak dapat diserap, belanja yang tidak dapat diserap yaitu belanja mediko legal, pemeriksaan untuk korban hidup dan meninggal (autopsi), bidang PPPA sudah menindaklanjuti melalui PKS dengan RS bhayangkara dan kepolisian, namun pihak kepolisian juga memiliki anggaran untuk Mediko legal, belanja lainnya yang tidak dapat diserap yaitu belanja tenaga ahli untuk kasus persidangan, dan biaya penjangkauan korban diluar kota tidak dapat diserap karena bergantung pada ada tidaknya kasus tersebut.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	35.030.000	34.980.000	99,86	100	50.000
2.		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	829.100.000	742490500	89,55	100	86.609.500

**Sasaran strategis ke tiga yang ingin dicapai adalah meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.**

Untuk mencapai sasaran ini, ada dua program yang dilaksanakan, yaitu program pemenuhan hak anak (PHA) dan program perlindungan khusus anak.

Program PHA memiliki realisasi anggaran 99,86% dan capaian kinerja yang sama dengan target, sehingga memiliki tingkat efisiensi yang tinggi (100%). Program ini berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 50.000. Program PHA bertujuan untuk memberikan layanan dasar bagi anak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan, sesuai dengan hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang.

Program perlindungan khusus anak memiliki realisasi anggaran 89,55% yang lebih rendah dari target, tetapi capaian kinerja yang sama dengan target, sehingga memiliki tingkat efisiensi yang tinggi (100%). Program ini berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 86.609.500. Program perlindungan khusus anak bertujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi anak yang mengalami pelanggaran hak, seperti kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran, sesuai dengan peraturan pemerintah. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kota Pontianak telah

melaksanakan program-program yang sesuai dengan sasaran strategisnya, dan berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 136.659.500. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan realisasi anggaran dan capaian kinerja program perlindungan khusus anak, agar dapat memberikan layanan yang lebih optimal bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	persen	100	100	100	Realisasi Indikator Program 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	persen	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dari target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Organisasi	40	40	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 40 organisasi, sama dengan target 40 organisasi. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	persen	100	100	100	Realisasi Indikator Program 100%, sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	persen	100	100	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%, sama dari target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	80	70	87,50	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 70 orang, lebih rendah dari target 80 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 87,50%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tinggi"
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	80	70	87,50	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 70 layanan, lebih rendah dari target 80 layanan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 87,50%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tinggi"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	(%)	Penjelasan Gagal/Berhasil
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	persen	30	30	100	Realisasi Indikator Kegiatan 30%, sama dari target 30%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1dokumen, sama dengan target 1dokumen. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi"

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa Tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2023, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan di Tahun 2021. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut :

**Tabel III.3**  
**Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Pratama	Madya	Nindya	100%

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2022/2023

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada Indikator sebagai berikut : Tingkatan dalam pencapaian predikat Kota Layak Anak terdiri 5 tingkatan yaitu : Pratama ; Madya; Nindya; Utama; Kota Layak Anak. Tingkat Capaian Kota Layak Anak: Realisasi tahun 2021 adalah Pratama. Terdapat peningkatan Realisasi tahun 2022 adalah Madya, naik satu tingkat dari tahun 2021. Realisasi tahun 2023 adalah Nindya, naik satu tingkat lagi dari tahun 2022 dan sesuai dengan target. Ini berarti Tingkat Capaian Kota Layak Anak Kota Pontianak mengalami peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, mencerminkan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Tingkat Capaian Kota Layak Anak: Capaian kinerja tahun 2023 adalah 100%, yang berarti naik satu tingkat dari Madya tahun 2022 menjadi Nindya. Ini

menunjukkan bahwa Kota Pontianak telah memenuhi hak dan perlindungan khusus untuk anak dalam berbagai aspek, seperti kelembagaan, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Pontianak termasuk dalam 76 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Nindya pada tahun 2023, setelah sebelumnya berpredikat Madya pada tahun 2022. Kota Pontianak juga merupakan salah satu dari 14 Provinsi Layak Anak (PROVILA) di Indonesia.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

**Tabel. III.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Renstra**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2022/2023

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator, Tingkat capaian Kota Layak Anak. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis DP2KBP3A Kota Pontianak, yaitu: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, Data tersebut juga menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja utama pada tahun 2023, serta target akhir renstra pada tahun 2024. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa: Tingkat capaian Kota Layak Anak pada tahun 2023 adalah Nindya, sama dengan target. Hal ini menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kota Pontianak berhasil meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan sasaran strategisnya. Namun, realisasi ini masih lebih rendah dari target akhir renstra Utama,

yang berarti masih perlu peningkatan kualitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban anak.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

**Tabel. III.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Standar Nasional
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	-

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2022/2023

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut : Dari indikator kinerja utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut diatas. Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi, ada empat tingkat KLA, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Tingkat KLA ditentukan berdasarkan pemenuhan 24 indikator KLA yang meliputi lima klaster, yaitu kelembagaan, kesehatan, pendidikan, partisipasi, dan perlindungan.

Menurut PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 34 Tahun 2022 - JDIH BPK RI, pada tahun 2021, ada 76 kabupaten/kota di Indonesia yang meraih predikat KLA, termasuk Kota Pontianak yang berpredikat Nindya. Kota Pontianak juga merupakan salah satu dari 14 Provinsi Layak Anak (PROVILA) di Indonesia. Selain Kota Pontianak, ada dua kabupaten lain di Kalimantan Barat yang meraih predikat KLA, yaitu

Kabupaten Landak yang berpredikat Madya dan Kabupaten Sambas yang berpredikat Pratama.

#### **5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Indikator Utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Faktor penghambat:

- a) Belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA) yang dalam bobot penilaian Kota Layak Anak memiliki nilai tertinggi yaitu 60 point.
- b) Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral
- c) Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak melaporkan dari sikorban kekerasan kepada DP2KBP3A Kota Pontianak
- d) Belum maksimalnya peran Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung terwujudnya KLA
- e) Belum maksimalnya peran dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- f) Kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, tahun 2023 terdapat 69
- g) Belum terbentukny UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

langkah yang akan dilakukan kedepan untuk pencapaian target IKU :

- a) Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stackholder terkait, termasuk dari kementerian
- b) Memaksimalkan peran swasta dengan membentuk wadah / kelompok dunia usaha yang ramah anak dan peduli akan hak – hak anak
- c) Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota Layak Anak.
- d) Memaksimalkan peran kader pendamping anak yang ada disetiap kelurahan sebagai ujung tombang dalam mengidentifikasi dan memitigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e) Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakukan di sekolah dan keluarahan
- f) Membentuk UPTD PPA untuk menyediakan layanan terhadap kasus-kasus kekerasan dan perlindungan anak. Memperkuat regulasi, pengawasan, dan nilai-nilai layak anak di masyarakat.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini ;

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 29,362,800	Rp 29,362,800	100,00
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 245,801,325	Rp 242,895,542	98.82
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 1,455,210,800	Rp 1,448,356,367	99.53
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 35,030,000	Rp 34,980,000	99.86
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 829,100,000	Rp 742,490,500	89.55
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 143,145,000	Rp 121,808,721	85.09
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 4,508,061,600	Rp 4,203,260,979	93.24
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 1,053,028,700	Rp 1,041,705,700	98.92

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 8 program yang dilaksanakan untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi, dari 8 program tersebut menunjukkan serapan anggaran diatas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran dalam rangka mewujudkan capaian kinerja OPD **“sangat tinggi”**. Secara detail dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar **Rp 29,362,800**. Realisasi yang telah dicapai mencapai **Rp 29,362,800**. Persentase realisasi program ini adalah **100%**. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran perempuan dan mengurangi

ketidaksetaraan gender. Meskipun realisasi hampir mencapai target, perlu terus memantau agar program ini dapat berjalan optimal.

2. **Program Perlindungan Perempuan:**

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar **Rp 245.801.325**. Realisasi yang telah dicapai mencapai **Rp 242.895.542**. Persentase realisasi program ini adalah **98.82%**. Program ini fokus pada perlindungan hak-hak perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Realisasi yang baik menunjukkan komitmen dalam melindungi perempuan di Kota Pontianak.

3. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat:**

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar **Rp 1.455.210.800**. Realisasi yang telah dicapai mencapai **Rp 1.448.356.367**. Persentase realisasi program ini sangat baik, yaitu **99.53%**. Program ini mendukung penguatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat di Kota Pontianak.

4. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA):** Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar **Rp 35.030.000**. Realisasi yang telah dicapai mencapai **Rp 34.980.000**. Persentase realisasi program ini sangat tinggi, yaitu **99.86%**. Program ini bertujuan untuk memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi. Realisasi hampir mencapai target yang optimal.

5. **Program Perlindungan Khusus Anak:** Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar **Rp 829.100.000**. Realisasi yang telah dicapai mencapai **Rp 742.490.500**. Persentase realisasi program ini adalah **89.55%**. Program ini fokus pada perlindungan anak dari berbagai risiko dan kekerasan. Perlu perhatian lebih agar realisasi dapat meningkat.

6. **Program Pengendalian Penduduk:** Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar **Rp 143.145.000**. Realisasi yang telah dicapai mencapai **Rp 121.808.721**. Persentase realisasi program ini adalah **85.09%**. Program ini berhubungan dengan pengelolaan pertumbuhan penduduk. Perlu evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan realisasi.
7. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):** Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar **Rp 4.508.061.600**. Realisasi yang telah dicapai mencapai **Rp 4.203.260.979**. Persentase realisasi program ini adalah **93.24%**. Program ini mendukung perencanaan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Realisasi yang baik menunjukkan komitmen dalam mengelola pertumbuhan penduduk.
8. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS):** Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar **Rp 1.053.028.700**. Realisasi yang telah dicapai Rp 1.041.705.700, Persentase Realisasi: 98.92%, Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

## BAB IV

### P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2023, diukur melalui 3 (tiga) indikator utama, seperti terlihat dalam table dibawah :

**Tabel IV.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan**  
**Dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,23%	0,96%	121,95%
2	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,05%	94,10%	101,00%
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1 dengan IKU Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak Pencapaian target 121,95% dan dinyatakan **sangat berhasil**, IKU Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak pencapaian target 101 % dapat dinyatakan **sangat berhasil**, IKU Tingkat Capaian Kota Layak Anak pencapaian target Nindya (100%) dinyatakan **sangat berhasil** mencapai target.

Pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama didukung oleh 8 (delapan) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan rutin dan belanja tidak langsung) tersebut diperoleh dari dana APBD Tahun 2023 sebesar total belanja OPD sebelum perubahan adalah Rp 14.001.552.712,

dan setelah perubahan menjadi Rp 14.250.924.802. Terjadi penambahan belanja sebesar Rp 249.372.090 atau sekitar 1,78%. Dengan realisasi sebesar Rp. 13.629.688.261,57 atau 95,64%.

Adapun beberapa hambatan dan kendala yang ditemui antara lain :

- 1) Belum terperdakannya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan
- 2) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak sampai dengan tahun 2023 12,70%, jauh dibawah target nasional sebesar 8,60%.
- 3) kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB
- 4) Belum terbentuknya Pokja KKBPK dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, stakeholder dan forum masyarakat kampung KB dalam memberikan penyuluhan dan informasi tentang program-program KB serta mensukseskan program-program KB.
- 5) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
- 6) Harapan Hidup: Faktor ini mencakup angka harapan hidup pada saat lahir. Jika perbedaan harapan hidup antara laki-laki dan perempuan signifikan, ini dapat memengaruhi IPG.
- 7) Pendidikan: Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga mempengaruhi IPG. Jika perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih rendah, ini dapat memperburuk ketidaksetaraan.
- 8) Kehidupan yang Layak: Perkiraan pendapatan adalah indikator penting. Jika perempuan memiliki pendapatan yang lebih rendah, ini memengaruhi IPG.
- 9) Keterwakilan di Parlemen: Proporsi keterwakilan perempuan di parlemen juga relevan. Jika partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik rendah, ini mempengaruhi IPG.

- 10) Distribusi Pendapatan: Upah buruh non-pertanian juga memainkan peran. Jika perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah, ini memperburuk ketidaksetaraan.
- 11) Belum terbentuknya UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- 12) Belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA) yang dalam bobot penilaian Kota Layak Anak memiliki nilai tertinggi yaitu 60 point.
- 13) Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral
- 14) Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dari korban kekerasan kepada DP2KBP3A Kota Pontianak
- 15) Belum maksimalnya peran Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung terwujudnya KLA
- 16) Belum maksimalnya peran dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- 17) Kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, tahun 2023 terdapat 69
- 18) Belum terbentuknya UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mengupayakan berbagai langkah kebijakan berupa:

- 1) Membuat perda GDPK yang bermanfaat untuk menyediakan kerangka pikir dan panduan (road map) untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan

- 2) Menyediakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara gratis, khusus untuk MKJP Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP) akan digratiskan pelayanannya khusus untuk masyarakat miskin yang tidak dicover oleh BPJS Kesehatan dan selain akan digratiskan, akseptor tersebut juga diberikan barang kebutuhan pokok untuk pengganti biaya hidup semasa mereka mendapatkan pelayanan pemasangan MOP dan MOW, hal ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan MKJP.
- 3) Memaksimalkan peran Kampung KB dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPk serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
- 4) Kolaborasi antara berbagai instansi terkait untuk mengoptimalkan program dan kebijakan terkait pertumbuhan penduduk.
- 5) Meningkatkan Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Kampanye edukasi tentang perencanaan keluarga dan dampak pertumbuhan penduduk dapat membantu mengelola laju pertumbuhan.
- 6) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak.
- 7) Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi semakin tinggi di Kota Pontianak, sehingga kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki semakin mengecil.
- 8) meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan kesadaran tentang kesehatan.
- 9) melibatkan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan.
- 10) pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan kesempatan kerja.

- 11) Melakukan Kampanye edukasi tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.
- 12) Meningkatkan akses perempuan ke peluang kerja dan pelatihan.
- 13) Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan.
- 14) Membentuk UPTD PPA untuk menyediakan layanan terhadap kasus-kasus kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. Melibatkan perempuan dan anak-anak dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang berbasis hak asasi.
- 15) Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk dari kementerian
- 16) Memaksimalkan peran swasta dengan membentuk wadah / kelompok dunia usaha yang ramah anak dan peduli akan hak – hak anak
- 17) Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota Layak Anak.
- 18) Memaksimalkan peran kader pendamping anak yang ada di setiap kelurahan sebagai ujung tombang dalam mengidentifikasi dan memitigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 19) Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakukan di sekolah dan kelurahan
- 20) Membentuk UPTD PPA untuk menyediakan layanan terhadap kasus-kasus kekerasan dan perlindungan anak. Memperkuat regulasi, pengawasan, dan nilai-nilai layak anak di masyarakat.

Kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan yang dilakukan diharapkan akan mewujudkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, yaitu

**“Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”** dan pencapaian Visi Kota Pontianak **“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT”**.

Pontianak, Februari 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA PONTIANAK**

**SINTYA AUGUSTIANTI, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19710817 199903 2 004**